

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan 4, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Adiyanto Soemardjono, “*Public Use Requirement in Eminent Domain: A Comparative Study of The United States and Indonesia*” Thesis School Of Law, University Of Berkeley, 1994.
- Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Hugh Collins, *Regulating Contracts*, London: Oxford University Press, 1999.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (Teori-teori Keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Maria S.W Soemardjono, *Dinamika Pengaturan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- _____, *Agenda Yang Belum Selesai: Refleksi Atas Berbagai Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*, dalam *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Elips 1998.
- Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999.
- M Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- R. Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat*. Bandung: Agrarian Resources Center, 2018.

- Saafroedin Bahar, *“Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat”*, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia, 2006.
- Salim Hs. dkk., *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan jasa pemerintah di Indonesia)*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Sri Sadono, Laporan Proyek Perubahan, *Strategi Pengadaan Tanah Guna Menunjang Percepatan Pembangunan Jalan Tol*, Balai Pendidikan Dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2019.
- Sugiyanto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Sebuah Analisis Dalam, Perspektif Hukum dan Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Tody Sasmitha Dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.
- Hengki Andora Dkk, *Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand), 2019.

B. Artikel Jurnal

- Dinda Anna Zatika Dan Hamzah, 2018, *Pactum Law Jurnal*, Vol 1 Nomor 3 Tahun 2018, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara Pt. Hutama Karya (Persero) Dan Pt. Waskita Karya (Persero) Tbk.*
- Georges Langrod, 1955, *Administrative Contract (A comparative Study)*, *The American journal of Comparative Law*, Summer: Number III.
- Ilyas Ismail, 2010, *“Kedudukan & Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”*, *Jurnal Unsyiah*, Banda Aceh, Kanun No. 50 Edisi April 2010
- Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H Dkk., 2018, *Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok Perkara: Pengujian Pasal 50 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Selanjutnya Disebut UU Jalan)*, Ikhtisar Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVI/2018 Perihal Konsesi Pengusahaan Jalan Tol
- Senthot Sudirman, 2014, *“Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan*

Gagasan Upaya Penyelesaiannya”, Jurnal Bhumi Nomor 40 Tahun 2013, Oktober 2014.

Siti Raga Fatmi, 2018, *Jurnal Lentera Hukum, Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Universitas Jember.

Sri Redjeki Slamet, 2016, *Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3*, Desember 2016, “*Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa*”.

Tesya Veronika Dan Atik Winanti, “*Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara*”, Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 2 Nov 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*” (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya*”, (Ln 1961/288: Tln No. 2324, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961).

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”, (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3451).

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*” (Lembaran Negara RI Nomor 35).

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”

Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*”

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”

Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 tentang penugasan khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur*”

Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, “[*Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun*](#)”

[2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat](#)

Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, “Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya”

Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat”

D. Website

Anonym, “Infrastruktur di Indonesia” pada laman website <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/infrastruktur/item381> diakses pada 23 maret 2024 Pukul 22.00 WIB

Arif Gunawan, Dijelaskan Pada Laman Berita, [Bisnis.Com](https://bisnis.com) Dengan Judul “Progres Tol Padang-Pekanbaru Lambat, Ini Penjelasan Bpjt”, Dengan Website <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201125/45/1322542/progres-tol-padang-pekanbaru-lambat-ini-penjelasan-bpjt>. Diakses Pada 2 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB

Awaluddin Awe, “Marthen : Tol Sicipa tak Berhenti, Tapi kalau tak Ada Lahan, Apa Mau Dikerjakan” pada laman <https://www.harianindonesia.id/berita-utama/marthen-tol-sicipa-tak-berhenti-tapi-kalau-tak-ada-lahan-apa-mau-dikerjakan.html> diakses pada Senin, 16 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB

Trio Hamdani “Terganjil Lahan, Proyek Tol Padang-Pekanbaru Dimulai dari Bangkinang” <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4875187/terganjal-lahan-proyek-tol-padang-pekanbarudimulai-dari-bangkinang>. Diakses pada 10 Jui 2023 Pukul 09.00 WIB.

Badan Pengatur Jalan Tol, Laman Infografis Dan Informasi Hukum Kementerian Maritim Dan Investasi Diakses Pada <https://jdih.maritim.go.id/infografis/badan-pengatur-jalan-tol> Pada 28 Februari Tahun 2024 Pukul 20.00 WIB

Badan Pengatur Jalan Tol, Pembangunan Ruas Tol Padang - Sicincin Dilanjutkan, Target Tuntas 2024, Diakses Pada Laman <https://bpjt.pu.go.id/Berita/Pembangunan-Ruas-Tol-Padang-Sicincin-Dilanjutkan-Target-Tuntas-2024>. Hari Selasa, 12 Maret 2024 Pukul 21.30 WIB

Biro Komunikasi Publik, Website Berita Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pembangunan Tol Padang-Peknabaru Dimulai, Diakses Pada Laman <https://pu.go.id/Berita/Pembangunan-Tol-Padang-Pekanbaru-Dimulai> Diakses Pada 2 Januari 2024 Pukul 19.00 WIB

Dadi Suryandi, S.H., M.H., 2017, Artikel Hukum Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum, pada laman <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan->

[adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html#:~:text=Tanah%20ulayat%20kaum%20berfungsi%20sebagai,ini%20menjadi%20harta%20sumpah%20setia.](#) Diakses pada Kamis, 4 Maret 2024 pada pukul 23.30 WIB

Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D, “*Dampak Positif Dan Negatif Tol Riau-Sumbar*”, Pada Laman <https://Kominfosandi.Kamparkab.Go.Id/2021/07/31/Dampak-Positif-Dan-Negatif-Tol-Riau-Sumbar/> Diakses Pada 2 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nasional (KPIIP) ditampilkan pada laman <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/jalan-dan-jembatan/jalan-tol-bukittinggi-padang-panjang-lubuk-alung-padang-200km-bagian-trans-sumatera/> diakses pada 23 Februari 2024 Pukul 21.00 WIB

Konsolidasi Tanah, Hukum Properti.Com Pada Laman <https://Hukumproperti.Com/Konsolidasi-Tanah/> Diakses Pada 19 Januari 2024 Pada Pukul 10.00 WIB

M Sayuti Dt Pangulu, Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, dalam tulisan “*Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat*” pada laman <https://www.bwi.go.id/705/2012/01/06/hak-hak-masyarakat-atas-tanah-ulayat/> diakses pada 24 Maret 2024 Pukul 23.30 WIB

Sejarah Jalan Tol Di Indonesia, Website Resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Diakses Pada Laman, <https://Bpjt.Pu.Go.Id/Konten/Jalan-Tol/Sejarah> Pada 28 Februari 2024 Pukul 19.00 WIB

